

# PERUBAHAN RENCANA KERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANJAR**



**Jln. Masjid Agung No, 2 Tlp. (0265) 742250  
KOTA BANJAR**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 dapat tersusun tepat pada waktunya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banjar, Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjar,



**IRWAN ADHIWAN S. R., S.STP., M.Si.**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19810501 199912 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD .....	24
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
4.1. Catatan dalam penyusunan Rencana Kerja.....	44
4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan .....	44
4.3. Rencana tindak lanjut .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kota Banjar.....	12
Tabel 2.2.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Banjar.....	33
Tabel 2.3.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota BANjar Tahun 2024.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2.	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4
Gambar 1.3.	Tindaklanjut Renja dengan proses penyusunan RAPBD	4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang mana penyusunannya memperhatikan kewenangan lembaga dan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar tercipta keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah

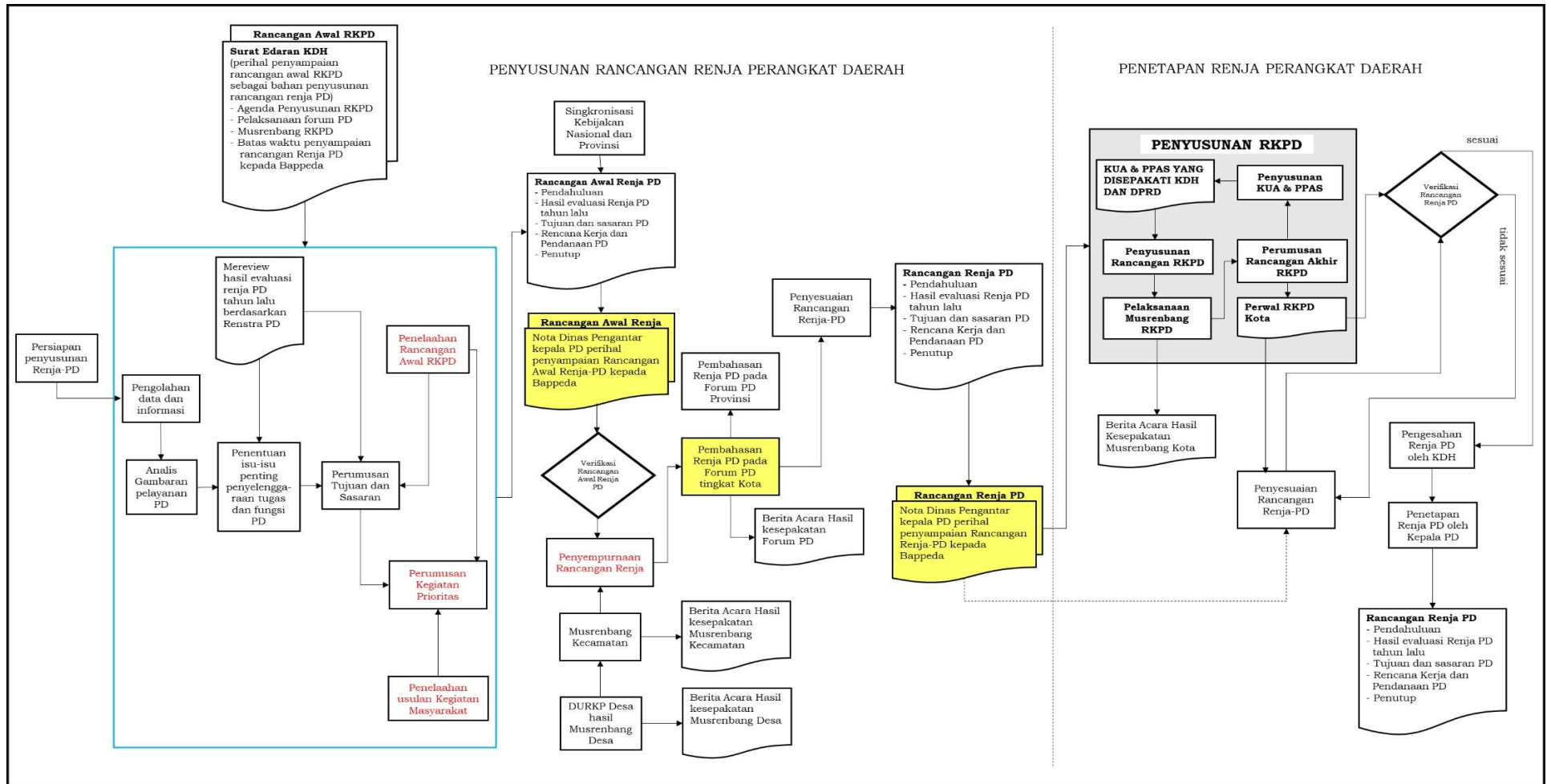
jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun bagan alir penyusunan Perubahan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam gambar 1.1. di bawah ini:

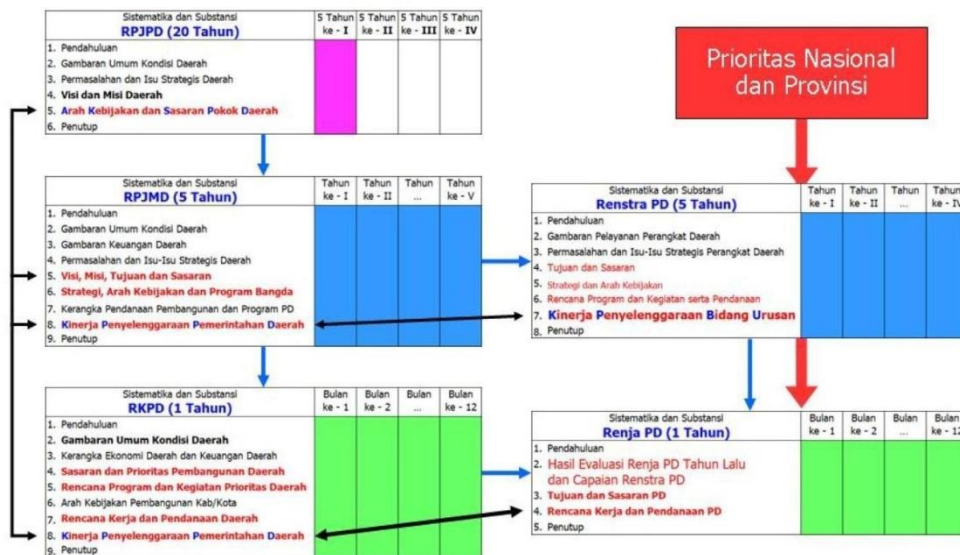
**Gambar 1.1.**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah**





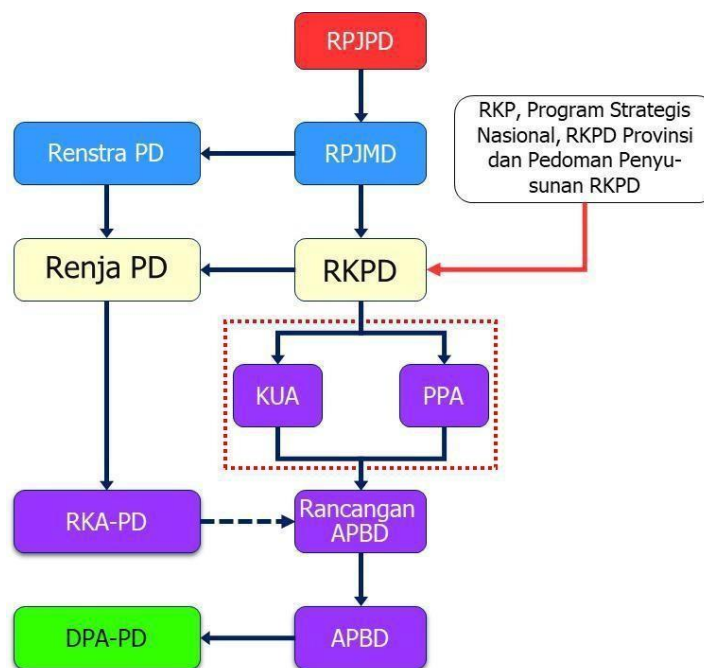
Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan**



Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.3.**  
**Tindak lanjut Rencana Kerja dengan proses penyusunan RAPBD**



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi

- Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah *Tahun 2022*;
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  30. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Tahun 2022;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
  34. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar,
  35. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);
36. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  37. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjar, (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
  38. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6.a tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana strategis perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 6.a);
  39. Peraturan Walikota Banjar Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024'

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 disusun dengan maksud agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Sedangkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar fungsi di lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif yang berkelanjutan.

## **1.4. Sistematika Penyusunan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Rencana Kerja K/L dan Perubahan Rencana Kerja provinsi/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan**

Bab ini memuat kajian tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Daerah, paling sedikit mencakup urusan/ program/ kegiatan, lokasi, indikator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN BERKENAN**

#### **2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan Ke II Tahun Berkenan**

Kajian (review) pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang mengacu kepada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 2024 anggaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebesar Rp. 10.206.786.702,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah, dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.580.893.010,-
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 1.715.893.692.-

Rekaptulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 dijelaskan dalam tabel 2.1. berikut ini:



**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan**  
**Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan ke II Tahun 2023**  
**Kota Banjar**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja , Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perubahan Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja PD tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12=(5+7+9)	13=+(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	25 %	100 %	33%
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	25 %	100 %	33%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	28 %	100 %	33,33%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	98 %	100 %	33,33%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	25,00%
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 dokumen	40,00%
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 dokumen	40,00%

1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 dokumen	40,00%
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 dokumen	40,00%
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	8 Lap	8 Lap	1 Lap	8 dokumen	27,59%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	4 Lap	4 Lap	1 Lap	4 dokumen	33,33%
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>300 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>31 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33,33%</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang/bln	0 Orang/bln	0 Orang/bln	0 Orang/bln	0 %	70 Org/Bln	70 Org/Bln	71 org/bln	70 Orang/bln	100,00%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	12 dokumen	20,00%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	2 Lap	2 Lap	1 Lap	2 Laporan	100,00%
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>300 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33,33%</b>
1.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100,00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	4 Lap	4 Lap	0 Dokumen	4	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 lap	0 lap	0 lap	0 lap	0 %	1 Lap	1 Lap	0 Dokumen	1	
1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	33,33%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	1 paket	1 paket	0 %	1 Paket	100,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	1	
1.05.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	26 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 %	1 orang	1 orang	0 %	1 orang	0,00%
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	16 %	100 %	33,33%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	12 Paket	12 Paket	0 Paket	12 Paket	33,33%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	12 Paket	12 Paket	3 Paket	12 Paket	33,33%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	12 Paket	12 Paket	0 Paket	12 Paket	33,33%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	12 Paket	12 Paket	3 Paket	12 Paket	33,33%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	12 Paket	12 Paket	3 Paket	12 Paket	33,33%
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	36 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	156 Dokumen	156 Dokumen	0 Dokumen	156 Dokumen	433,33%

		Undangan yang Disediakan										
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	12 Lap	12 Lap	0 Lap	12 Laporan	33,33%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	12 Lap	12 Lap	6 Lap	12 Laporan	33,33%
1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>300 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33,33%</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 Paket	0	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0,00%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebeul	Jumlah mebel yang tersedia	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 %	2 Paket	2 Paket	0 Paket	2 unit	200,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	100,00%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>35 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33,33%</b>
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0 %	12 Lap	12 Lap	0 Lap	12 Laporan	33,33%

1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0 %	12 Lap	12 Lap	6 Lap	12 Laporan	33,33%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0 %	13 Lap	13 Lap	7 Lap	13 Laporan	33,33%
1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	13 %	100 %	33,33%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	12 Unit	12 Unit	24 Unit	12 Unit	33,33%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	14 Unit	14 Unit	0 Unit	14 unit	33,33%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	3 Unit	3 Unit	0 Unit	3 unit	42,86%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 unit	50,00%
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	23 %	100 %	33,33%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentramana dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	34 %	100 %	33,33%

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	12 Lap	12 Lap	6 Kasus	12 Kasus	33,33%
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	36 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	12 Lap	12 Lap	3 Kasus	12 Kasus	33,33%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	33,33%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	150 org	0 org	0 org	0 org	0 %	50 Org	50 Org	0 Org	50 orang	33,33%
1.05.02.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	36 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	12 dokumen	33,33%
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat yang tersedia	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 %	5 Unit	5 Unit	0 Unit	5 paket	33,33%

1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 dokumen	33,33%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	33,33%
<b>1.5.2.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>300 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33 %</b>	<b>100 Laporan</b>	<b>33,33%</b>
1.5.2.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	36 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 %	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	33,33%
1.5.2.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0 %	12 Lap	12 Lap	0 Lap	12 Lap	33,33%
1.5.2.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	72 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0 %	24 Lap	24 Lap	12 Lap	24 Lap	33,33%

1.5.2.2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>Presentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	300 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	33,33%
1.5.2.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0 %	3 Lap	3 Lap	0 Lap	3 Lap	100,00%



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
  - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

B. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan;
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
  - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa;
  - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
  - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan sub kegiatan:
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

C. Faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yaitu dikarenakan kegiatan/sub kegiatan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada triwulan ke 3 dan ke 4 tahun 2024.

D. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Adapun faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

E. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah;

Dengan adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang target kerjanya belum tercapai, maka dengan adanya kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamng Praja Kota Banjar Tahun 2024 dan target kinerja sasaran pada Renstra 2024-2026 di tahun akhir Renstra, lebih jauh lagi akan berpengaruh terhadap capaian visi dan misi kepala daerah.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang belum terpenuhi targetnya, maka untuk tahun-tahun perencanaan ke depan langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Menyusun perubahan anggaran yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Melakukan penyesuaian pelaksanaan teknis kegiatan dengan regulasi

- yang berlaku;
3. Meningkatkan dukungan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian target renstra;
  4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi berkaitan dengan perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi atau APBN;
  5. Melaksanakan kerja sama dengan masyarakat/komunitas/kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan.

## **2.2. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Review terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024, dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Banjar tahun 2024 kemudian dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan.

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banjar Tahun 2024 dilakukan dalam upaya mensinergikan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Kota Banjar tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah, serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kota Banjar 2024-2026 dan pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selain itu, review terhadap Perubahan RKPD Kota Banjar Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan II tahun 2024, permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis, asumsi fluktuasi nilai harga serta perubahan regulasi yang mengatur tentang perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah. Berikut ini hasil review terhadap Perubahan Rancangan awal RKPD Tahun 2024 dijelaskan dalam tabel 2.2. di bawah ini:

**Tabel 2.2.**  
**Riview terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**  
**Tahun 2024**

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUM LINMAS</b>				<b>10.653.211.244</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUM LINMAS</b>				<b>10.955.991.306</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>9.214.167.590</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>9.257.047.614</b>
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>16.000.000</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dok</b>	<b>4.500.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	500.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	500.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 laporan	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>7.062.217,118</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	71 org/bulan	<b>1.173.949.592</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 org/bulan	7.059.217.118	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 laporan	1.173.499.592
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	500.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satpol PP	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satpol PP	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>7.500.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dok</b>	<b>5.000.000</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	5.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	1.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	-



Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>Cakupan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>106.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>Cakupan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satpol PP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satpol PP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>188.345.100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 paket</b>	<b>153.450.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	43.345.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	10.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	16.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	156 dok	7.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	156 dok	19.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 laporan	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	116.950.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9 unit</b>	<b>10.000.000</b>
Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	10.000.000	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 paket	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.649,305.372</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 laporan</b>	<b>1.704.988.022</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.500.022	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 laporan	49.500.022
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	1.615.805.350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1.654.488.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>164.800.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 unit</b>	<b>205.160.000</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	62.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	205.160.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	95.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	5.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Satpol PP	<b>Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100 %	<b>1.439.043.654</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Satpol PP	<b>Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100 %	1.698.943.692
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Satpol PP	<b>Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota</b>	100 %	<b>658.999.850</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Satpol PP	<b>Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota</b>	12 kasus	706.300.000
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 kasus	449.999.850	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 kasus	450.000.000

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Satpol PP	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	12 kasus	15.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Satpol PP	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	1 dokumen	14.700.000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	4 dok	10.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dok	10.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 org	20.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 org	20.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	12 dok	94.000.000
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dok	94.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 unit	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 unit	94.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 dok	5.000.000
Penusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	5 dok	5.000.000	Penusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 dokumen	107.600.000

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP	Jumlah layanan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 dokumen	10.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP	Jumlah layanan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100 %	5.000.000
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>754.041.604</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	Satpol PP	<b>Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>12 laporan</b>	<b>936.593.692</b>
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	379.036.604	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	306.426.850
Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 laporan	15.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 laporan	8.400.000
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	360.005.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	621.766.842
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabuten/Kota</b>	Satpol PP	<b>Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya</b>	<b>1 orang</b>	<b>26.002.200</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabuten/Kota</b>	Satpol PP	<b>Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya</b>	<b>3 laporan</b>	<b>56.050.000</b>
Pengembangan Kapasitas dan Karir PNS	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	26.002.200	Pengembangan Kapasitas dan Karir PNS	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	3 laporan	56.050.000

Hasil riview terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjar tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbedaan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD Kota Banjar Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terapat dalam rancangan awal RKPD Kota Banjar Tahun 2024 dan analisis hasil kebutuhan sebanyak 2 program, 11 kegiatan dan 48 sub kegiatan.
- b. Terdapat perbedaan jumlah pagu indikatif anggaran antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Jumlah pagu indikatif anggaran Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 10,653,211,244 sedangkan jumlah pagu indikatif hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 10,955,991,306

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banjar Tahun 2024 dilakukan dalam upaya mensinergikan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Kota Banjar tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah, serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kota Banjar 2024-2026 dan pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selain itu, review terhadap Perubahan RKPD Kota Banjar Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan II tahun 2024, permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis, asumsi fluktuasi nilai harga serta perubahan regulasi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar disertai dengan indikator kinerja serta pagu indikatifnya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026.
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Hasil evaluasi terhadap capaian Renja sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, serta dengan memperhatikan target akhir capaian rencana strategis.

Secara keseluruhan sifat penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebar di wilayah Kota Banjar, hanya ada beberapa program/kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di luar Kota Banjar seperti Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM dan Pengembangan Kapasitas Karir PPNS.

Untuk lebih jelas terkait dengan rencana kerja dan pendanaan setelah perubahan perangkat daerah tersaji dalam tabel 3.1. berikut ini:

**Tabel 3.1.**  
**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)**  
**Kota Banjar Tahun 2024**

Nama OPD: Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KETERAN GAN
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 5	URUSAN Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100 %	100 %	10.296.786.702	10.955.991.306	659.204.604	-	-	659.204.604	10.815.110.313	APBD	
1 5 1	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		100 %	100 %	8.580.893.010	9.257.047.614	676.154.604	-	-	676.154.604	9.373.009.573	APBD	
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dok, perencanaan panggangan dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	17.900.000	APBD	
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dok, Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok, perencanaan perangkat daerah	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	3.500.000	APBD	
1 5 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dok, RKA- SKPD	Jumlah Dok, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen RKA-SKPD	3 Dok	2 Dok	500.000	500.000	-	-	-	-	1.600.000	APBD	
1 5 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dok, Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok, Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	500.000	500.000	-	-	-	-	1.600.000	APBD	



1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok, DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen DPA-SKPD	2	Dok	2	Dok	500.000	500.000	-	-	-	-	1.600.000	APBD		
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok, Erubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	2	Dok	500.000	500.000	-	-	-	-	1.600.000	APBD		
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok, Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dok	9	Laporan	500.000	500.000	-	-	-	-	3.500.000	APBD		
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok, evaluasi kinerja	4	laporan	4	Laporan	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	45.000.000	APBD		
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6.634.744.988</b>	<b>7.173.949.592</b>	<b>539.204.604</b>	-	-	-	<b>539.204.604</b>	<b>7.201.649.592</b>	<b>APBD</b>	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	71	org/bulan	70	org/bulan	6.634.244.988	7.173.449.592	539.204.604	-	-	-	539.204.604	7.198.449.592	APBD	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	1	Laporan	500.000	500.000	-	-	-	-	1.600.000	APBD		
1	5	1	2.02	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok,	12	Dok,	-	-	-	-	-	-	1.600.000	APBD		
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-	-	-	-	<b>10.100.000</b>	<b>APBD</b>		
1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok, pengamanan barang milik daerah SKPD	2	Dok	1	Dok	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	7.000.000	APBD		
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dok,	4	Dok,	-	-	-	-	-	-	1.500.000	APBD		
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	Laporan	-	-	-	-	-	-	1.500.000	APBD		

1	5	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	%	100	%	-	-	-	-	-	6.500.000	APBD		
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	1	paket	1	Paket	-	-	-	-	-	-	APBD		
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dok, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dok,	1	Dok,	-	-	-	-	-	1.500.000	APBD		
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	orang	1	Orang	-	-	-	-	-	5.000.000	APBD		
1	5	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	%	100	%	86.500.000	153.450.000	66.950.000	-	-	66.950.000	203.912.600	APBD	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	12	paket	12	Paket	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.200.000	APBD		
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	paket	12	Paket	15.000.000	15.000.000	-	-	-	45.412.600	APBD		
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	paket	12	Paket	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.200.000	APBD		
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	12	Paket	10.000.000	10.000.000	-	-	-	16.000.000	APBD		
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	12	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	-	17.000.000	APBD		
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok, bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	156	dok	156	Dok	-	-	-	-	-	20.000.000	APBD		
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	12	Laporan	-	-	-	-	-	1.100.000	APBD		
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	12	Laporan	50.000.000	116.950.000	66.950.000	-	-	66.950.000	100.000.000	APBD	

1	5	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>10.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>APBD</b>		
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Mebeul	Jumlah paket mebeul yang disediakan	1	paket	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	1	Unit	-	10.000.000	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>10.000.000</b>	-	-	APBD	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	-	-	-	-	-	-	35.000.000	-	APBD	
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	unit	9	Unit	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	APBD	
1	5	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.704.988.022</b>	<b>1.704.988.022</b>	-	-	-	-	<b>1.651.755.361</b>	-	<b>APBD</b>	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	12	Laporan	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	APBD	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	Laporan	32.500.022	49.500.022	<b>17.000.000</b>	-	-	<b>17.000.000</b>	34.950.011	-	APBD	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	laporan	13	Laporan	1.671.488.000	1.654.488.000	-	-	-	<b>17.000.000</b>	1.615.805.350	-	APBD	
1	5	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>145.160.000</b>	<b>205.160.000</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	<b>60.000.000</b>	<b>186.192.020</b>	-	<b>APBD</b>	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	unit	36	Unit	145.160.000	205.160.000	<b>60.000.000</b>	-	-	<b>60.000.000</b>	66.192.020	-	APBD	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibatarkan pajaknya	14	unit	14	unit	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	APBD	

	Operasional atau Lapangan												
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-	5.000.000	APBD	
1 5 1 2.09 #	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22 unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	15.000.000	APBD	
1 5 2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.715.893.692</b>	<b>1.698.943.692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.950.000</b>	<b>1.442.100.740</b>	<b>APBD</b>	
1 5 2 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian pelanggaran K3</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>706.300.000</b>	<b>706.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.098.000</b>	<b>APBD</b>	
1 5 2 2.01 1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	12 kasus	12 Laporan	450.000.000	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	APBD	
1 5 2 2.01 2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	12 kasus	12 Laporan	14.700.000	14.700.000	-	-	-	-	14.098.000	APBD	
1 5 2 2.01 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dok, yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam	1 Dok,	1 Dok,	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	APBD	

					rangka ketentraman dan ketertiban umum													
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	dok	4	Dok	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	24.000.000	APBD
1	5	2	2.01	7	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dok, hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	50	org	50	Org	94.000.000	94.000.000	-	-	-	-	94.000.000	APBD
1	5	2	2.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasaran ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	12	dok	12	Dok	-	-	-	-	-	-	5.000.000	APBD
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dibuat dan dimutakhirkan	4	unit	5	Unit	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	APBD
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dok, hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	5	dok	5	Dok	107.600.000	107.600.000	-	-	-	-	50.000.000	APBD
1	5	2	2.01	#	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Dok,	1	Dok,	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	10.000.000	APBD
1	5	2	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda/Perkada</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>936.593.692</b>	<b>936.593.692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>754.000.540</b>	<b>APBD</b>

1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dok, hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/keompok masyarakat/pelaku usaha	12 laporan	12 Dok	306.426.850	306.426.850	-	-	-	-	379.000.540	APBD
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Walikota	12 laporan	12 laporan	8.400.000	8.400.000	-	-	-	-	15.000.000	APBD
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	24 laporan	24 laporan	621.766.842	621.766.842	-	-	-	-	360.000.000	APBD
1	5	2	2.03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PPNS Satpol PP</b>	<b>1 orang</b>	<b>1 orang</b>	<b>73.000.000</b>	<b>56.050.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.950.000</b>	<b>26.002.200</b>	<b>APBD</b>
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas Karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	3 laporan	73.000.000	56.050.000	-	-	-	16.950.000	26.002.200	APBD

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebesar Rp. 10,955,991,306,- dengan rincian:

- 1) Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 9,257,047,614,- Anggaran untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 1,698,943,692,-

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan yang terkait langsung dengan sasaran strategis dan urusan pemerintahan daerah sebanyak 1 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-
  - Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.700.000,-
  - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibann Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp.107.600.000,-
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
  - Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
  - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp.94.000.000,-

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan sub kegiatan:
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 306.426.850,-
  - Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 621.766.842,-
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS, dengan pagu anggaran sebesar Rp.56.050.000,-



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja**

Dalam rumusan Perubahan Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 terjadi perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun dari jumlah pagu anggaran. Hal tersebut disesuaikan dengan rencana kebutuhan perangkat daerah berdasarkan analisis hasil kebutuhan dan kemampuan APBD Kota Banjar.

Secara keseluruhan, pagu anggaran indikatif dalam Perubahan Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 sebesar Rp. 10,955,991,306,-. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp. 659,204,604,- jika dibandingkan dengan Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024.

#### **4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani

dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD, RPD, RKPD Kota Banjar dan Rencana Strategis Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024-2026.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Kota Banjar sebagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun rencana tindak lanjut Satpol PP Kota Banjar dalam Renja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan anggaran kepada Walikota melalui TPAD dalam proses penyusunan KUAPPA Perubahan APBD;
2. Menggali potensi penambahan anggaran yang bersumber dari luar APBD Kota Banjar;
3. Melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kota Banjar ini disusun sebagai acuan kerja tahun 2024. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah kita.

Banjar, Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjar



**IRWAN ADHIWAN S. R., S.STP., M.Si.**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19810501 199912 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANJAR  
TAHUN 2024

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			BERTAMBAH/BERKURANG (PERUBAHAN RKPD - RKPD MURNI)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	PERAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL/DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
	<b>DINAS/BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>10.653.211.244</b>	<b>10.296.786.702</b>	<b>10.955.991.306</b>							
1	05				10.653.211.244	10.296.786.702	10.955.991.306	659.204.604	Kota Banjar	APBD			10.815.110.313	
1	05	01			100%	100%	9.214.167.590	8.580.893.010	9.257.047.614	676.154.604			100%	9.373.009.573
1	05	01	2.01		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	16.000.000	4.500.000	4.500.000	-		100%	17.900.000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-	2 dokumen	3.500.000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen RKA-SKPD\	1 dokumen	2 dokumen	1.500.000	500.000	500.000	-	2 dokumen	1.600.000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen Perubahan RKA-SKPD\	1 dokumen	2 dokumen	1.500.000	500.000	500.000	-	2 dokumen	1.600.000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen DPA-SKPD\	1 dokumen	2 dokumen	1.500.000	500.000	500.000	-	2 dokumen	1.600.000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Erubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dikumen Perubahan DPA-SKPD\	1 dokumen	2 dokumen	1.500.000	500.000	500.000	-	2 dokumen	1.600.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	9 laporan	3.000.000	500.000	500.000	-	8 Laporan	3.500.000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 laporan	4 laporan	4.000.000	1.000.000	1.000.000	-	4 laporan	4.500.000
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.062.217.118</b>	<b>6.634.744.988</b>	<b>7.173.949.592</b>	<b>539.204.604</b>	<b>100%</b>	<b>7.201.649.592</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70 orang/bulan	70 orang/bulan	7.059.217.118	6.634.244.988	7.173.449.592	539.204.604	70 orang/bulan	7.198.449.592
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.500.000	500.000	500.000	-	2 laporan	1.600.000
1	05	01	2.02	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000	-	-	-	12 Dokumen	1.600.000
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>10.100.000</b>
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2 Dokumen	7.000.000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Dokumen	1.500.000	-	-	-	4 Laporan	1.600.000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	-	-	-	12 Laporan	1.500.000
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>106.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>6.500.000</b>
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	1 paket	1 paket	100.000.000	-	-	-	-	-
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	-	-	-	1 dokumen	1.500.000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	5.000.000	-	-	-	1 orang	5.000.000
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>188.345.100</b>	<b>86.500.000</b>	<b>153.450.000</b>	<b>66.950.000</b>	<b>100%</b>	<b>203.912.600</b>
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	12 paket	2.200.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	43.345.100	15.000.000	15.000.000	-	12 paket	45.412.600
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12 paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	12 paket	2.200.000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-	12 paket	16.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	16.000.000	7.500.000	7.500.000	-	12 paket	17.000.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	156 dokumen	156 dokumen	19.000.000	-	-	-	156 dokumen	20.000.000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	1.000.000	-	-	-	12 laporan	1.100.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	90.000.000	50.000.000	116.950.000	66.950.000	12 laporan	100.000.000
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Mebeul	Jumlah paket mebeul yang disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	-	-	-	-	-
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			BERTAMBAH/BERKURANG (PERUBAHAN RKPD - RKPD MURNI)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PERAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							Kota Banjar	APBD			1 unit	35.000.000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Kota Banjar	APBD			1 unit	60.000.000
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.649.305.372</b>	<b>1.704.988.022</b>	<b>1.704.988.022</b>	-	Kota Banjar	APBD			<b>100%</b>	<b>1.651.755.361</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kota Banjar	APBD			12 laporan	1.000.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	32.500.022	32.500.022	49.500.022	17.000.000	Kota Banjar	APBD			12 laporan	34.950.011
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	13 laporan	1.615.805.350	1.671.488.000	1.654.488.000	-	Kota Banjar	APBD			13 laporan	1.615.805.350
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>164.800.000</b>	<b>145.160.000</b>	<b>205.160.000</b>	<b>60.000.000</b>	Kota Banjar	APBD			<b>100%</b>	<b>186.192.020</b>
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	36 unit	62.000.000	145.160.000	205.160.000	60.000.000	Kota Banjar	APBD			12 unit	66.192.020
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibatarkan pajaknya	14 unit	14 unit	95.000.000		-	-	Kota Banjar	APBD			14 unit	100.000.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	2.400.000		-	-	Kota Banjar	APBD			3 unit	5.000.000
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.400.000		-	-	Kota Banjar	APBD			1 unit	15.000.000
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.439.043.654</b>	<b>1.715.893.692</b>	<b>1.698.943.692</b>	<b>16.950.000</b>	Kota Banjar	APBD			<b>100%</b>	<b>1.442.100.740</b>
1	05	02	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian pelanggaran K3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>658.999.850</b>	<b>706.300.000</b>	<b>706.300.000</b>	-	Kota Banjar	APBD			<b>100%</b>	<b>662.098.000</b>
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	449.999.850	450.000.000	450.000.000	-	Kota Banjar	APBD			12 Laporan	450.000.000
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	14.700.000	14.700.000	-	Kota Banjar	APBD			12 Laporan	14.098.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kota Banjar	APBD			4 dokumen	10.000.000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kota Banjar	APBD			50 Orang	24.000.000
1	05	02	2.01	07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	12 dokumen	12 dokumen	94.000.000	94.000.000	94.000.000	-	Kota Banjar	APBD			12 dokumen	94.000.000
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	5 Unit	5 Unit	5.000.000		-	-	Kota Banjar	APBD			5 Unit	5.000.000
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dibuat dan dimutakhirkan	5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kota Banjar	APBD			5 dokumen	5.000.000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	107.600.000	107.600.000	-	Kota Banjar	APBD			1 dokumen	50.000.000
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kota Banjar	APBD			1 laporan	10.000.000
1	05	02	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda/Perkada</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>754.041.604</b>	<b>936.593.692</b>	<b>936.593.692</b>	-	Kota Banjar	APBD			<b>100%</b>	<b>754.000.540</b>
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	12 laporan	12 dokumen	379.036.604	306.426.850	306.426.850	-	Kota Banjar	APBD			12 laporan	379.000.540
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Walikota	12 laporan	12 laporan	15.000.000	8.400.000	8.400.000	-	Kota Banjar	APBD			12 laporan	15.000.000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	24 laporan	24 laporan	360.005.000	621.766.842	621.766.842	-	Kota Banjar	APBD			24 laporan	360.000.000
1	05	02	2.03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PPNS Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26.002.200</b>	<b>73.000.000</b>	<b>56.050.000</b>	<b>16.950.000</b>	Kota Banjar	APBD			<b>100%</b>	<b>26.002.200</b>

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			BERTAMBAH/BERKURANG (PERUBAHAN RKPD - RPKD MURNI)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PERAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas Karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketramaran masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 laporan	3 laporan	26.002.200	73.000.000	56.050.000	-	16.950.000	Kota Banjar	APBD			1 laporan	26.002.200
<b>JUMLAH</b>									<b>10.653.211.244</b>	<b>10.296.786.702</b>	<b>10.955.991.306</b>	<b>659.204.604</b>	Kota Banjar	APBD					<b>10.815.110.313</b>